

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang – Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H., 1996, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Magnar, Kuntana dan Bagir Manan, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Marbun, B. N., 2007, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sumali, 2002, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang – Undang (Perpu)*, UMM Press, Malang.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiyoso, Yonathan dan Sadu Wasistiono, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Fokus Media, Bandung.
- Yani, Ahmad, 2011, *Pembentukan Undang – Undang dan Perda*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Yudhoyono, Bambang, 2005, *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4560).

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5729).

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1256).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/K/DPRD/2014 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82/K/DPRD/2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.

C. INTERNET

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, "Focus Group Discussion Penyusunan Formasi dan Proyeksi Kebutuhan PNS Tahun 2016", <http://www.bkd.jogjaprov.go.id/detail/focus-group-discussionpenyusunan-formasi-dan-proyeksi-kebutuhan-pns-tahun-2016/390>, diakses 20 Juli 2016.

Biro Hukum Setda DIY, "*Update Produk Hukum Terbaru*", <http://birohukum.jogjaprov.go.id>, diakses 20 Juli 2016.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, "Alumni Diklat Fungsional Perancang", <http://www.djpp.kemenkumham.go.id/fungsional-perancang/48-alumni-diklat-fungsional-perancang.html>, diakses 20 Juli 2016.

Suhariyono, 2010, "Peningkatan Kualitas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/97-peningkatan-kualitas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.html>, diakses 7 Oktober 2016.

D. JURNAL

Asshiddiqie, Jimly, 2005, "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional", *Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.

- Paturusi, I.A., *et al*, 2009, “Penelitian tentang Esensi dan Urgenitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”, *Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Universitas Hasanudin*, Makassar.
- Widiati, E.P., 2013, “Local Legislative Drafting in the Unitary States: A Comparison Between Indonesia and Philippines”, *Yuridika*, Vol. 28, No.3, 2013.